

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.idWebsite : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN VIA WEBSITE (STUDI EMPIRIS KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR PERIODE 2018)

Adni Dwi Astuti¹¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sleman 55288, Yogyakarta

Email : Adnikanzoe687@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakatnya adalah memberikan laporan pertanggung jawaban, salah satunya adalah laporan keuangan. Transparansi menjadi salah satu aspek yang menggambarkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan kewajiban dengan baik. Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diambil dari website resmi pemerintah daerah Jawa Timur dan BPS Jawa Timur. Sampel penelitian berjumlah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial variabel jumlah penduduk, belanja daerah dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang tidak positif terhadap transparansi informasi keuangan via website pada pemerintah Jawa Timur.

Kata kunci : Transparansi; Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

One of the responsibility of local government to the community is to provide a report of liability, one of which is the financial statement. Transparency is one aspect that illustrates that institution has made a good obligation. Some of the variables used in this study were the financial statements of the East Java local government. This research uses quantitative methods with secondary data taken from the official website of the local government of East Java and BPS Jawa Timur. Research samples amounted to 38 districts/cities in East Java. The analysis used is a simple linear regression. The results of the study explained that in partial variables the population, regional expenditure and indigenous revenue have an unpositive influence on the transparency of financial information via the website of the East Java government.

Keywords: *Transparency, Financial Information Local Governments.*

I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan yang diimbangi dengan prinsip transparansi. Karena dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah. Sehingga masyarakat mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan yang ingin diterapkan pemerintah tersebut. Akuntabilitas dan transparansi

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.idWebsite : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

merupakan salah satu perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Berhubungan dengan hak otonomi pengelolaan keuangan daerah sendiri, pemerintah menekankan penerapan aspek akuntabilitas dan penerapan prinsip transparansi sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya. Sehingga warga dapat memberikan feedback dan outcomes terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Salah satu aspek yang mendasari adanya penyelenggaraan laporan yang baik adalah transparansi. Tata kelola yang baik dari sebuah lembaga memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses kegiatan lembaga tersebut, termasuk dalam hal keuangan. Transparansi menjadi aspek penting yang digunakan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Albalate, 2012). Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat transparansi sebuah lembaga, diantaranya akseibilitas dokumen, informasi yang lengkap, proses yang mudah, peraturan yang menjamin tansparansi (Kristiante, 2006).

Website menjadi salah satu media yang mempermudah akses untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baik untuk sesama lembaga maupun antar lembaga dan masyarakat. Banyak dari lembaga pemerintah telah menggunakan cara ini untuk mengabrkan keadaan lembaga tersebut. Namun, disayangkan dalam penggunaannya belum semua lembaga memberitahukan laporannya, seperti lapaorn keuangan daerah tahunan.

Pelaporan kinerja sebuah lembaga dapat dipublikasikan melalui website. Penggunaan teknologi berupa Website memberikan kemudahan untuk banyak pihak dikarenakan biaya yang murah, kemudahan untuk mengakses dengan menggunakan teknolgi apabila dibandingkan dengan menggunakan cara manual (Bondon, 2005). Keadaan ini diperkuat dengan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ/2012 mengenai penyediaan menu TPA (Transparansi pengelolaan keuangan) dengan 12 dokumen yang memiliki kaitan dengan pengelolaan anggaran PAD website resmi pemerintah daerah (Ningsih, 2018). Pengukuran kualitas laporan keuangan sektor pemerintah dalap diliat dari penyediaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Beberapa faktor yang mempengaruhi transparansi akuntansi lembaga pemerintah via website adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah. Faktor-faktor ini diperkuat dengan penelitian Resti Febriya Ningsih (2018) yang menjelaskan bahwa pendapata asli daerah tidak emberikan pengaruh positif terhadap transparansi laporan lembaga pemerintah daerah. Sedangkan faktor belanja memberikan pengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan via website. Namun, penelitian Sofia Yasmin dan Chaudhry (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tidak memberikan pengaruh positif dalam kegiatan lembaga dikarenakan adanya faktor lain yang mengakibatkan tidak efektifnya sistem akuntabilitas dan transparansi tersebut.

II. KAJIAN TEORITIS

Transparansi

Salah satu prinsip dari sistem akuntablitas adalah transparansi. Dalam penjelasannya transparansi membahas mengenai runtutan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

anggaran daerah (Mardiasmo, 2009: 105). Dengan artian masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk tahu akan tata kelola keuangan yang mana hal ini memiliki hubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Andrianto (2007) menjelaskan transparansi publik adalah toleransi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar memiliki kesempatan untuk mengetahui proses pengelolaan sumber daya publik.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab 2 pasal 2 mengenai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dijalankan sesuai dengan dasar transparansi, akuntability dan partisipatif serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan disiplin anggaran. Dengan adanya prinsip transparansi dalam pengelolaan dana memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kegiatan pemerintah dalam hal kebijakan, perkembangan dan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian dari kegiatan tersebut.

Beberapa asas transparansi yang dapat diperhitungkan pelaksanaannya sesuai dengan indikator berikut (Loina, 2013: 15):

1. Mekanisme toleransi atau keterbukaan pelayanan publik yang terjamin
2. Adanya fasilitas mengenai mekanisme kebijakan dan pelayanan sektor publik
3. Tersedianya fasilitas penunjang proses informasi serta penyimpangan yang terjadi pada instansi pemerintahan dalam kegiatan pelayanan.

Prinsip transparansi menjadi salah satu prinsip yang penting dalam sistem tata kelola pemerintahan yang dibangun atas informasi yang bebas, seluruh proses kegiatan, mengenai pemerintahan, lembaga serta informasi yang diperlukan oleh golongan yang memiliki kepentingan dan memberikan kemudahan pengawasan mengenai penggunaan dana tersebut (Corynata, 2007).

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa bagian dari laporan keuangan sebagai variabel yang mempengaruhi informasi keuangan pemerintah melalui internet/via website seperti jumlah penduduk di tiap daerah kabupaten, pendapatan asli daerah tiap kabupaten dan belanja pemerintah daerah.

Teori Keagenan

Dalam pengaplikasiannya melalui akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah sejalan dengan teori keagenan. Menurut Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2006: 54) teori keagenan adalah teori yang digunakan untuk melakukan penganalisaan susunan kontraktual antara dua atau lebih individu, kelompok dan organisasi. Teori keagenan merupakan konsep yang memberikan penjelasan mengenai prinsipal yang memilik orang lain sebagai agen dalam menjalankan tugas termasuk dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini dapat diterapkan pada sektor publik seperti pendelegasian dari masyarakat kepada wakil diparlemen.

Dalam penyampaian laporan keuangan, pemerintah daerah sebagai pemilik informasi keuangan daerah terkadang hanya memaksimalkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan dampak kepada masyarakat. Sehingga dalam beberapa periode, pemerintah tidak memberikan laporan keuangan. Sehingga masyarakat tidak dapat mengawasi tindakan pemerintah mengenai keutusan yang dibuat. Hal ini akan mengakibatkan munculnya biaya keagenan yang ditanggung oleh pemerintah sebagai salah satu usaha yang dilakukan dalam memberikan informasi transparansi kepada masyarakat. Jensen

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

dan Meckling (1967) menjelaskan bahwa terdapat 3 biaya yang diakibatkan dari adanya simetri informasi:

1. Monitoring cost, biaya yang digunakan untuk mengawasi perilaku agen.
2. Bonding cost, biaya yang menjamin bahwa agen tidak akan bertindak untuk kepentingan pribadi.
3. Residual cost, kerugian yang ditanggung oleh agen akibat dari penyimpangan keputusan yang dilakukan prinsipal.

Teori Signal

Teori persinyalan dari perspektif publik menjelaskan bahwa pihak perusahaan berusaha memberikan informasi yang baik kepada masyarakat mengenai keadaan lembaga. Dengan banyaknya keingintahuan masyarakat mengenai keadaan lembaga, teori persinyalan dapat membantu pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) untuk mengurangi masalah informasi yang terjadi melalui pelaporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan yang diberikan oleh pemerintah mengenai laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan website (Puspita, 2012). Manfaat yang diberikan dari pelaporan keuangan bukan hanya menjalankan kewajiban akan tetapi juga mendapatkan pandangan positif dari masyarakat karena telah menjalankan program yang dijanjikan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan alat statistik dan pengujian hipotesis. Data penelitian berupa data sekunder yang didapatkan dari BPS Jawa Timur, LKPD daerah Jawa Timur dan BKBP Jawa Timur. Total sampel data yang digunakan adalah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun setelah data terkumpul selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode regresi linear sederhana (Ali Muhson, 2012). Variabel penelitian untuk informasi akuntansi melalui internet/website digunakan pengukuran dengan metode scoring yang dikembangkan oleh Gracia (2010). Penilaian indeks tersebut dilakukan dengan penilaian berikut :

Kategori	Uraian	Scoring
Informasi yang tercatat	Jumlah anggaran	1
	Neraca	1
	LRA	1
	LAK	1
	Opini Audit	1
	CaLK	1
	Data Tahun Lalu	0.75
	Segment Reporting	0.75
Format	PDF	1
	HTML	0.75

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

	Flash	0.75
	Exel	0.5
	PPT	0.5
	Word	0.5
Interaksi Dengan Pengguna	Email	1
	Forum	1
	Mailing List	1

Dengan menggunakan penilaian diatas, apabila telah mendapatkan score untuk tiap tiap kabupaten maka akan dibagi hasilnya dengan nilai maksimal yaitu 16,5. Nilai setelah pembagian akan mencapai nilai 0 dan nilai maksimal 1. Adapun persamaan model regresi linear sedernaha dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{isw} = \alpha + \beta_1.JP + \beta_2.B + \beta_3.PAD + \varepsilon \dots \dots (1)$$

Dimana JP adalah jumlah penduduk tiap kabupaten/kota. B adalah belanja daerah pertahunnya dan PAD adalah pendapatan asli daerah tiap kabupaten.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan menjadi salah satu bukti pertanggung jawaban pemerintah akan kegiatan yang berlangsung. Mengenai laporan pemerintah daerah masyarakat dapat melihat alur pengeluaran pemerintah melalui internet dan memperhatikan pengeluaran yang berupa belanja daerah dan pendapatan asli daerah. Berikut adalah hasil pengolahan data menggunakan eviews.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.06573	1.338704	9.012991	0.0000
JP	1.93E-06	2.32E-06	0.830852	0.4119
B	0.001995	0.003928	0.507967	0.6148
PAD	-0.002288	0.004587	-0.498772	0.6212

Dari data yang dikumpul dan diolah menggunakan regresi linear mendapatkan hasil t-statistik dari variabel JP adalah 0,83 dengan probabilitas 0,41. Sehingga hipotesis dengan pernyataan bahwa JP atau jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap akses informasi keuangan via Website ditolak karena miliki probabilitas lebih besar dari 0,05. Untuk variabel belanja daerah dengan nilai t-statistik 0,5 dengan probabilitas 0,61. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh terhadap akses informasi keuangan via website ditolak. Dan variabel pendapatan asli daerah (PAD) dengan nilai t-statistik -0,49 dengan probabilitas 0,62 maka pernyataan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh kepada akses informasi laporan keuangan via website. Sedangkan secara F-statistik menunjukkan nilai 0,93 untuk hasil dari keseluruhan variabel, maka secara simultan ketiga variabel tersebut hanya memiliki 0,1 pengaruh terhadap akses laporan keuangan pemerintah daerah via website.

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.idWebsite : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

Sedangkan 0,93 sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti variabel politik dan keadaan asing masing daerah.

V. KESIMPULAN

Salah satu aspek yang mendasari terselenggaranya laporan yang baik adalah transparansi. Menjadi ciri yang paling penting dari perwujudan tanggung jawab yang dilakukan setiap pemerintah daerah. Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat tidak perlu lagi mencari bentuk laporan ke kantor pemerintah daerah setempat, namun dapat mengaksesnya menggunakan internet di website pemerintah daerah masing-masing. Tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat namun juga memberikan kemudahan pada pihak pemerintah. Karena dengan menggunakan internet pihak pemerintah dapat mengurangi pengeluaran. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, belanja daerah dan pendapatan asli daerah menunjukkan nilai t-statistik $> 0,05$ sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akses laporan keuangan pemerintah melalui internet/website. Sedangkan secara simultan, dengan berdasarkan pada F-statistik 0,93 menjadi gambaran bahwa masih banyak variabel lain yang mempengaruhi akses informasi laporan keuangan pemerintah daerah via website

Berdasarkan kesimpulan diatas keterbatasan peneliti dimana variabel-variabel penelitian tidak menggambarkan transparansi informasi keuangan daerah. Adanya variabel diluar variabel internal yang memiliki pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Dari kekurangan diatas peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai keterkaitan/hubungan antar variabel yang memiliki kaitan dengan proses transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya menggunakan penelitian menggunakan data primer agar lebih mengetahui secara spesifik penyebab banyaknya lembaga pemerintah yang tidak mengupload laporan keuangan secara berkala.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol 2.
- Andrianto, Nico. 2007. Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publising.
- Astuti, Ratih M. 2013. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah DPPKAD Kabupaten Grogong.
- Corynata, 2008. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional X Unhas Makassar.
- Jensen & Meckling. 1976. The Teory Of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. Journal Of Finance And Economics, 3:305-360.
- Jitmau, Fanny Et.Al. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Akbupaten Sorong).

Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Email : megaaktiva@febi.umkendari.ac.id

Website : <https://megaaktiva.umkendari.ac.id/index.php/Jurnal>

- Latham, Garyp, Dan E.A.Locke. 1990. A Theory Of Goal Setting And Task Performance. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Mardiasmo. Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Academia.Edu.
- Masrdiamo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Muhson, Ali. 2012. Pelatihan Analisis Statistik Dengan SPSS. Yogyakarta: FE.UNY
- Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kunaitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Sujarweni, V Wiratba. 2015. Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Yasmin, Sofia. Dan Ghafran, Chaudry. 2019. The Problematics Of Accountability: Internal Responses To Ekternal Pressures In Exposed Oranisations. Elsiwier.
- Ningsih, Resti F. 2018. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi trasparansi informasi keuangan daerah via website.
- Afryansyah, Rahmad D. Dan Haryanto. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di Internet oleh pemerintah daerah. Diponegoro journal of accounting. Vol, 2. No, 3. ISSN 2337-3806. 01-11.